BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan *electronic ticketing* di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan *electronic government* yaitu :

1. Komunikasi dalam kebijakan *electronic ticketing* di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung sangat baik. Hal ini dapat terlihat dari para aparatur yang telah menjalankan komunikasi dengan disiplin guna mencapai tujuan berjalannya kebijakan untuk pelayanan public kepada masyarakat.
2. Sumber daya dalam kebijakan *electronic ticketing* di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung cukup baik. Terlihat dalam hal sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan *electronic ticketing*.
3. Disposisi dalam dalam kebijakan *electronic ticketing* di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung dapat dikatakan sangat baik karena dapat terlihat dalam menjalankan tugas oleh aparatur yang diwujudkan dengan kedisiplinan, keramahan dan kesopanan.
4. Struktur birokrasi dalam dalam kebijakan *electronic ticketing* di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung

sangat baik, hal ini bisa terlihat dari struktur birokrasi yang berjalan dengan sangat disiplin sesuai dengan ketentuannya masing-masing.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis merekomendasikan saran sebagai berikut :

1. Komunikasi dalam dalam kebijakan *electronic ticketing* di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung harus lebih ditingkatkan dengan kedisiplinan dan harus menjaga kedisiplinan dalam berkomunikasi yang telah ada supaya pelayanan public kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik.
2. Sumber daya dalam kebijakan *electronic ticketing* di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung harus lebih ditingkatkan dalam hal sarana dan prasarana guna membangun pelayanan publik untuk masyarakat dengan baik.
3. Disposisi dalam kebijakan *electronic ticketing* di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung aparatur menjalankan tugas masing-masing berdasarkan tugasnya harus lebih ditingkatkan supaya kebijakan pemerintah dapat terlaksana sebaik mungkin.
4. Struktur birokrasi dalam kebijakan *electronic ticketing* di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung harus

bertugas sesuai dengan ketentuannya masing-masing dengan lebih menekankan kepada profesionalitas kerja maka pelaksanaan implementasi kebijakan *electronic government* dalam meningkatkan pelayanan publik melalui *electronic ticketing* yang dapat menciptakan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, transparan, dan murah.